

KRITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Hidayatun Azizah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

azizaholan.zshop@gmail.com

ABSTRACT

The system of free-market as a modern society system, in reality, does not fully prop prosperity up for society. This as if contradicts to Invisible Hand theory of Adam Smith becoming background of free-market system. In one hand, it cannot be denied that the free-market system has helped the achievement of economic growth rapidly. But, in another hand, that growth is not gathered with equalization so it causes the social imbalance and discrepancy. In fact, the benefit of free-market system is only taken by the investors, while the poor people must allow their power to be sold to the investors. Therefore, by the imbalance fact of free-market system, it is proper that the existence of free-market as an income distribution mechanism is questionable. By that fact, Islamic economy offers an alternative solution due to inefficient free-market system in capitalism system. That solution is by giving government opportunity as regulator. This is urgent because by their authority, the imbalance of market mechanism can be minimized. Their actualization in the public is based on Tauhid, al-Adl, and Khilafah principle as the basic of economic interaction. In this case, the main act of government is related to the fulfillment of basic need and guarantee in achieving the spiritual values implementation in the social life.

Keyword: *Invisible Hand, Basic Need, Tauhid, al-Adl, Khilafah*

ABSTRAK

Sistem pasar bebas sebagai sistem sosial masyarakat modern, dalam realitasnya belum sepenuhnya menopang terhadap tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini seakan bertolak belakang dengan teori *Invisible Hand* Adam Smith yang menjadi landasan sistem pasar bebas. Dalam satu sisi, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pasar bebas telah membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan pesat, namun di sisi yang lain pertumbuhan tersebut tidak di barengi dengan pemerataan sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Sistem pasar bebas nyata-nyata hanya bisa di nikmati oleh kalangan pemilik modal saja, sementara kalangan miskin harus merelakan tenaganya untuk di jual kepada kalangan pemilik modal. Oleh karena itu, dengan fakta ketimpangan yang dilahirkan sistem pasar bebas, patutlah kiranya eksistensi sistem pasar bebas sebagai mekanisme distribusi pendapatan dipertanyakan. Dari hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif atas ketidak efisienan sistem pasar bebas dalam sistem kapitalisme. Solusi tersebut adalah dengan lebih memberikan ruang pada pemerintah sebagai regulator. Hal ini penting, sebab dengan otoritas pemerintah yang jelas, ketimpangan dalam mekanisme pasar dapat terminimalisasi. Aktualisasi pemerintah di ruang publik tersebut didasarkan pada prinsip *Tauhid*, *al-Adl*, dan *Khilafah* sebagai dasar dalam interaksi ekonomi. Dalam hal ini, peran pokok pemerintah adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: *Invisible Hand*, *Basic Need*, *Tauhid*, *al-Adl*, *Khilafah*

PENDAHULUAN

Menurut Adam Smith sistem sosial masyarakat modern adalah sistem pasar bebas atau dalam istilah Adam Smith di sebut dengan sistem kebebasan kodrati dan keadilan.¹ Sistem ini, tidak terlepas dari akumulasi ketidak tuntasannya sistem sebelumnya yakni *merkantilisme* dan *fisiokrat* yang dipandang Adam Smith tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Adam Smith mencoba melahirkan gagasan baru yang bertitik tolak pada pandangan bagaimana kesejahteraan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.

Dari sini, Adam Smith menyatakan bahwa jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya, maka kesejahteraan akan dapat terealisasi. Hal tersebut merupakan inti dari teori *Invisible Hand* yang digagasnya. Adam Smith begitu yakin dengan kebebasan individu, sebab dengan bimbingan tangan gaib (*Invisible Hand*) kebebasan individu tersebut, akan melahirkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya sistem ini hanya melahirkan ketimpangan sosial. Kepercayaan terhadap individu yang begitu besar terkhusus bagi pemilik modal pada akhirnya melahirkan relasi sosial yang dalam istilah Karl Marx sebagai *Eksplorasi* dan *Alienasi* (keterasingan).²

Dewasa ini, di mana kapitalisme semakin menggelombang yang di iringi dengan mobilisasi modal kakap, makin membuat kelas tak bermodal atau miskin termarginalkan dalam gilda-gilda kapitalisme. Minimnya peran pemerintah dalam interaksi ekonomi makin memperparah nasib kelas ini, pada hal salah satu tugas pemerintah adalah melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar tiap warganya. Namun, dalam relasi sistem pasar bebas kapitalisme, hal tersebut seakan tereduksi dengan kepentingan korporat-korporat lokal maupun transnasional.

Menurut Kevin Danaher, dalam bukunya yang bertajuk “10 alasan bubarkan IMF dan Bank Dunia “ menyatakan bahwa globalisasi pasar yang getol dikampanyekan oleh IMF dan Bank Dunia dalam kenyataannya menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Menurut *The United Nations Development Program* (UNDP) sebanyak 20 % kaum kaya di seluruh dunia telah menguasai 86% sumber daya dunia, sedangkan kaum miskin dan menengah diseluruh dunia sebanyak 80% menikmati 14% saja kekayaan dunia.³

Fakta di atas adalah satu di antara fakta-fakta ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi pasar bebas. Fakta lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah seperti kerusakan lingkungan, relasi sosial dan moralitas. Dari hal ini, patutlah kiranya jika saat ini gerakan resistensi terhadap sistem pasar bebas sebagai instrumen distribusi pendapatan muncul kepermukaan. Berangkat dari hal ini. Islam melalui sistem ekonominya mencoba menawarkan

¹ Lihat A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995, h. 4 2 Faranz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperseusihan Revisionisme, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 102

² Kritik Ekonomi Islam Vol 1 No 2 Desember 2015 | 254

³ Kevin Danaher, 10 Reason Abolish IMF And World Bank, terj. AB. Widyanta, (Yogyakarta: Pustaka Cindelaras, 2005), h. 1

solusi

alternatif atas kebuntuan sistem pasar bebas sebagai instrument distribusi pendapatan. Tulisan ini, bermaksud untuk menelaah sistem pasar bebas yang bersandar pada teori *Invisible Hand* Adam Smith dengan memotret berbagai fakta ketimpangan yang terjadi termasuk didalamnya Indonesia yang hari ini lebih cenderung pada sistem pasar bebas ini. Sebagai solusi alternatif penulis mencoba menawarkan gagasan teoritis ekonomi Islam melalui konsep fundamental yang di usung oleh Ibn Taymiyah.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Sistem Pasar Bebas (Kerangka Teoritis)

Doktrin pasar bebas pada awal mulanya berangkat dari gagasan seorang ekonom Inggris pada abad 18 yakni Adam Smith, yang gelisah terhadap sistem perekonomian dominan saat itu yakni merkantilisme dan fisiokrat yang di anggap tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam *The Wealth of Nations* sebagai karya agungnya, Adam Smith menolak pandangan kaum fisiokrat tentang pentingnya lahan dalam mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengabaikan sistem perburuhan dan pembagian kerja.⁴

Menurut Adam Smith, buruh merupakan prioritas tinggi dan pembagian buruh kedalam beberapa unit kerja, akan berakibat pada kenaikan yang signifikan terhadap hasil produksi. Smith memakai contoh dengan pembuatan jepitan. Satu pekerja bisa membuat dua puluh pin sehari. Tapi jika sepuluh orang dibagi menjadi delapan belas langkah yang diperlukan membuat sebuah jepitan, mereka bisa membuat 48.000 jepitan dalam sehari.⁵

Selain itu, Adam Smith juga menolak pandangan kaum merkantilisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud hanya dengan jalan perdagangan ekspor impor logam mulia (Emas dan Perak). Dengan kata lain, semakin besar cadangan logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin makmur pula kehidupan masyarakat negara tersebut. Namun demikian Adam Smith menolak anggapan kaum merkantilisme ini. Pergulatan Adam Smith dengan sistem dominan saat itu, pada akhirnya membawanya pada perenungan yang melahirkan teori *Invisible Hand* (Tangan Gaib). Teori ini berangkat dari analisa sistem sebelumnya yang cenderung proteksionis terhadap individu-individu dalam mengembangkan modalnya. Menurut teori ini :

Setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan pula ia tidak tahu sampai seberapa jauhkah untuk kepentingannya itu. Ia berbuat itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, hanya untuk keuntungan sendiri. Dan dalam hal ini ia dibimbing “tangan gaib” untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadi itu, ia akan

⁴ Lihat www.id.wikipedia.org/pasar_bebas/ /28-0-2020

⁵ Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.31 6Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro, (Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996), h. 16-17

m

endorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang sering kali bahkan lebih efektif dari pada kalau ia sengaja melakukannya.⁶

Melalui teorinya tersebut, Adam Smith mendorong pemerintahan pada saat itu untuk memberikan kebebasan individu dalam mengembangkan modal yang dimilikinya baik pada wilayah lokal maupun tansnasoinal. Adam Smith begitu yakin, bahwa kesejahteraan akan lahir manakala kebebasan individu itu terealisasikan. Kondisi demikian itu, bagi Adam Smith tidak tercipta dalam sistem merkantilisme dan fisiokrat yang cenderung proteksionis dan intervisionis terhadap individu-individu. Teori Invisible Hand ini, dalam perkembangannya menjadi kerangka dasar atas terciptanya mekanisme sistem pasar bebas. Doktrin pasar bebas yang dalam satu sisi seringkali orang menyandingkan dengan doktrin *Laissez Faire* menghendaki akan peran minimal dari negara atau pemerintah. Dalam istilah terkenal *laissez faire* diterjemahkan dengan Istilah ini berasal dari diksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para fisiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah atau negara dalam perdagangan. Seperti teori *Invisible Hand* Adam Smith, doktrin *laissez faire* berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (*private-enterprise economy*) akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (*centrally planned economy*).⁷

Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan. Konsep keadilan yang digagas Adam Smith ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelestarian system pasar bebas. Adam Smith menyadari bahwa kebebasan individu dalam interaksi ekonomi sebagaimana tertuang dalam teori *Invisible Hand* tidak sepenuhnya akan berjalan mulus sesuai mekanisme pasar. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya kerugian antar individu dalam system pasar bebas, Adam Smith menggagas konsep *keadilan komutatif* yang menghendaki setiap individu untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan.

Oleh karena itu, peran negara dalam diktum Adam Smith yang tercermin dalam perekonomian pasar bebas ala kapitalisme terdiri atas tiga hal, yakni pertama negara mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain kelestarian sistem ini, dibatasi akan intervensi pemerintah manakala terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas.⁸

⁶ "biarkanlah kami bebas berbuat" Kritik Ekonomi Islam Vol 1 No 2 Desember 2015 | 256

⁷ www.id.wikipedia.org/Laissez_faire/03-07-2008

⁸ Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, h. 7-8

elain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak adil. Dengan kata lain pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat :

1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.

Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil. Fungsi yang *kedua* yakni pertahanan keamanan. Fungsi ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Sedangkan fungsi yang *ketiga* adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastruktur baik berkenaan dengan sistem pasar bebas maupun berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah. Melalui tiga fungsi dasar pemerintah atau negara tersebut, Adam Smith sebagai *Founding Father* sistem kapitalisme meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan *Invisible Hand* (Tangan Gaib), sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan. Dari kedua doktrin ini sistem pasar bebas menjadi tumpuan sistem perekonomian kapitalisme dalam mengembangkan kesejahteraan bagi warganya.

B. Pertumbuhan Ekonomi Dan Depresi Hebat (The Great Depressions) 1930

Tidak bisa dipungkiri bahwa mekanisme pasar bebas telah mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara. Fakta akan hal ini tercermin dalam perekonomian Amerika pada dekade 1800 an yang telah telah mencapai puncak perkembangannya sampai dekade 1930 an. Gilda-gilda kapitalisme dengan modal kakapnya bekerja dengan luar biasa. Produksi barang-barang menjadi berlipat ganda sebagaimana yang diprediksikan oleh Adam Smith sebelumnya. Akumulasi modal semakin besar yang akhirnya berkembang pada satu titik yang tidak bisa terbendung lagi. Dalam kondisi demikian, kapitalisme berfikir untuk memperluas pangsa pasar produksinya dalam rangka mengembangkan modalnya. Dari sini, motif memperoleh laba dan keuntungan yang lebih besar pada akhirnya memlahirkan gerakan yang dikenal dengan kolonialisme.

engan tingkat pertumbuhan ekonomi demikian, ketika pasar tidak lagi mampu menyerap hasil produksi, maka perekonomian Amerika diguncang oleh depresi hebat pada dekade 1930 an. Peristiwa ini terkenal dengan *Malaise* atau The Great Depretions. Peristiwa ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat sehingga dengan lemahnya daya beli masyarakat hasil-hasil produksi tidak terserap oleh pasar. Dalam kondisi demikian, muncul seorang ekonom yang mencoba menjelaskan depresi tersebut.⁹

Adalah Jhon Maynard Keynes (1883-1946) pada tahun 1936, melalui karya monumentalnya *The General Theory of Employment Interest and Money*, mengenalkan konsep dan istilah yang ditujukan untuk membantu menjelaskan Depresi Hebat. Satu pendapat untuk kebijakan ekonomi laissez-faire selama resesi ialah jika konsumsi jatuh, maka rasio bunga akan jatuh juga. Tingkat

⁹ Arief Ramelan Karseno, Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, edt. Dr. Mohtar Mas' oed, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.12

unga yang lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan investasi dan permintaan akan tetap konstan. Keynes percaya kalau terdapat alasan kenapa investasi tidak selamanya secara otomatis naik sebagai reaksi atas jatuhnya konsumsi. Bisnis membuat investasi berdasar pada ekspektasi atas adanya keuntungan.¹⁰

Menurut Karl Marx, kapitalisme merupakan sistem yang didalamnya dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi yang pada hakekatnya adalah esensi dari sistem itu sendiri.¹¹ Oleh karena itu, perbaikan pada sistem ini pada dasarnya tidak akan mampu melahirkan perbaikan yang menyeluruh. Melalui hukum gerak ekonominya, Karl Marx menyatakan kehancuran kapitalisme adalah keniscayaan sejarah manusia.¹²

Winardi, Melalui sumbangsuhnya ini, Jhon Maynard Keynes terkenal sebagai satu di antara tiga tokoh ekonomi dunia selain Adam Smith dan Karl Marx. Adam Smith terkenal sebagai *Funding Father* ilmu ekonomi Modern sedangkan Karl Marx sebagai pendekonstruksi sistem Ekonomi dan Keynes sebagai penyelamat yang mengkonvergensi sistem kapitalis dan sosialis menjadi sistem ekonomi campuran. Lihat Mark Skousen,

Menurut Keynes, jika jatuhnya konsumsi muncul pada waktu lama, maka bisnis akan menunjukkan tren penurunan harapan dari penjualan masa depan. Oleh karena itu, menurut Keynes hal terakhir yang kapitalis pikirkan ialah berinvestasi dalam meningkatkan produksi di masa depan, bahkan apabila bunga lebih rendah maka modal tidak menjadi mahal. Dalam kondisi demikian peningkatan produksi sampai pada titik yang ekstrim sehingga terjadilah kejatuhan umum atau Depresi Hebat.

Solusi dari masalah ini, menurut Keynes, untuk melepaskan ketidakstabilan pasar adalah melalui intervensi pemerintah. Dalam pandangan ini, karena aktor swasta tidak bisa diandalkan untuk membuat permintaan agregat selama resesi, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat permintaan. Sejak saat itulah perekonomian Amerika sedikit demi sedikit terpulihkan. Sementara itu, Keynes dengan karyanya terkenal dengan teori kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi domain disiplin makro ekonomi.

C. Ketimpangan Dalam Sistem Pasar Bebas

Globalisasi kekuatan pasar bebas yang selama ini getol dikampanyekan oleh bank dunia dan IMF dalam kenyataannya telah menciptakan ketimpangan yang makin besar. Salah satu ketimpangan yang terjadi adalah tidak proporsionalnya penguasaan sumber daya alam produktif yang ada. Dari catatan UNDP dinyatakan bahwa kaum kaya dunia sebanyak 20% telah menikmati 86% kekayaan dunia, sedangkan 80% kaum miskin dan menengah dunia menikmati sekitar 14% seluruh kekayaan dunia.

¹⁰ Steven Pressman, Lima Puluh, h. 146-11

¹¹ Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi, (Bandung: Transito, 1985), h. 91

¹² Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, (Jakarta: Prenanda Media, 2005), h. 101

etimpangan tersebut dalam catatan Kevin Danaher jauh lebih ekstrim dari pada akhir Perang Dunia II sebelum IMF dan Bank Dunia berdiri.¹³

Ketimpangan yang sangat besar tersebut mengakibatkan tingginya tingkat ematian bagi anak-anak. Malnutrisi dan kelaparan menjadi pemandangan yang tidak asing lagi, sementara sekelompok orang kaya berjibakau dengan gelimang harta dari mekanisme pasar bebas. Derita jutaan orang tersebut adalah akibat dari terkondisikannya seluruh barang dan jasa dalam ekonomi global melalui mekanisme pasar. Semua orang akan paham bahwa mekanisme pasar digerakkan oleh kekuatan modal atau uang melalui mekanisme permintaan (*Demand*) dan penawaran (*Suplay*). Oleh karena itu, adalah wajar manakala kekayaan hanya berputar pada sekelompok kecil masyarakat kaya saja, sementara kelompok mayoritas yang notabene golongan miskin dan menengah hanya bisa pasrah terhadap nasibnya. Pertumbuhan ekonomi yang lahir dari mekanisme pasar bebas adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun fakta ketimpangan sosial dan jurang ketidakadilan dalam masyarakat juga tidak bisa dipungkiri sebagai konsekwensi logis mekanisme pasar bebas. Kuncinya adalah bahwa apa yang dikatakan Adam Smith dengan kesejahteraan yang otomatis lahir dari pergerakan individu melalui bimbingan *Invisible Hand* nyata-nyata dewasa ini makin tidak menunjukkan relevansinya. Jika pertumbuhan ekonomi adalah fakta yang nyata sebagai akibat mekanisme pasar bebas, lalu mengapa kesenjangan masih ada bahkan menunjukkan tren peningkatan. Mungkin pertanyaan ini adalah sering kali muncul dalam benak kita. Pada intinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam GNP tidak selamanya menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Sebab instrument pertumpuhan ekonomi yang didengung-dengungkan lewat indikator GNP memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut adalah *Pertama* instrumen GNP tidak dapat memotret tingkat ketimpangan antar sektor perekonomian, *kedua* GNP adalah indikator makro ekonomi yang di ukur secara agregatif (menyeluruh). Oleh karena itu, adalah sangat tidak relevan manakala melalui indikator GNP yang meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga relatif meningkat. Dalam konteks pembangunan perekonomian Indonesia, dimana dasar fundamentalnya terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, dekade terakhir ini justru kita banyak menemukan praktek pengangkangan terhadap konstitusi tersebut. Simak saja bagaimana penguasaan aset-aset oleh asing, dan berbagai kebijakan pro neoliberalisme mulai dari pencabutan subsidi secara bertahap, penguasaan tambang sampai pada glontoran modal asing lewat belanja modal pemerintah. Semua itu, mungkin bisa kita curigai sebagai gaya baru bagaimana kekuatan asing mendikte kembali pengelolaan negeri ini, sebagaimana mereka telah sukses pada era orde baru.

Tentu menjadi pertanyaan kita semua, dimana marwah Pasal 33 UUD 1945 tersebut. Jika pemerintah beralih semua itu adalah bagian dalam rangka

¹³ Kevin Danaher 10 Reason Abolish IMF And World Bank , Yogyakarta: Pustaka Cindelaras , 2005.h 2

ensejahterahkan rakyat faktanya menurut data resmi badan statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015, masih cukup tinggi yakni mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen).¹⁴

Angka tersebut memang betul telah mengalami penurunan sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen), namun angka 28,51 juta itu bukanlah angka yang kecil, belum lagi jika dasar pengukuran tersebut juga kadangkala dipermasalahkan dikalangan akademis terkait parameter yang digunakan. Hal ini, tentu menjadi koreksi kita bersama akan perekonomian bangsa ini terus akan digerus dengan paradigma neoliberalisme yang faktanya hanya menguntungkan pemodal saja. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi oleh pemerataan ekonomi adalah realitas sosial yang inheren dalam mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, bersandar kepada kekuatan pasar bebas sebagai tonggak perekonomian adalah sama artinya dengan menjerumuskan jutaan orang ke dalam lembah penderitaan dan ketidakadilan, serta pengangkangan terhadap fondasi perekonomian bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Minimnya cerita sukses yang di barengi oleh minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari mekanisme pasar bebas, adalah alasan yang cukup rasional untuk menelaah dan mempertanyakan kembali gagasan pasar bebas sebagai piranti sistem ekonomi modern dalam mendistribusikan barang dan jasa (pendapatan).

Solusi Alternatif Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif (hubungan vertikal), Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*World View*) bagi segenap para penganutnya (hubungan horizontal).

Dalam konteks mekanisme pasar, Islam memiliki seperangkat aturan yang termaktum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Aturan-aturan tersebut, dalam perkembangan sejarah ter *breakdown* oleh sarjana-sarjana muslim. Salah satu tokoh pemikir Islam yang menaruh perhatian besar dalam permasalahan mekanisme pasar pada khususnya dan permasalahan ekonomi pada umumnya adalah Ibn Taimiyah. Menurut Ibn Taimiyah, mekanisme pasar sebebapapun pada dasarnya tidak selalu mendatangkan kemadlorotan bagi umat manusia. Selama mekanisme pasar berjalan secara alamiah tanpa ada proses rekayasa dari komponen yang berwenang yang dalam hal ini adalah produsen dan konsumen, maka segala bentuk dinamika yang terdapat didalam mekanisme pasar bisa dibenarkan.

Bagi Ibn Taimiyah, mekanisme pasar yang erat kaitannya dengan permasalahan harga, pada dasarnya terbentuk oleh mekanisme permintaan (demand) dan penawaran (Supply). Oleh karena itu, naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Ada kalanya harga suatu barang

¹⁴ Persentase Penduduk Miskin September 2015 mencapai 11,13%, dalam <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1227>

aik disebabkan oleh faktor menurunnya produksi karena kemampuan perusahaan dan menurunnya impor. Keduanya (menurunnya produksi dan impor) memang berjalan dalam kapasitas yang maksimal dan tanpa adanya upaya untuk mengeruk keuntungan. Dalam kondisi demikian, Ibn Taimiyah berpendapat kenaikan harga tersebut adalah dibenarkan.¹⁵

Dalam hal ini Ibn Taimiyah secara eksplisit mengakui bahwa fluktuasi harga komoditas adakalanya disebabkan oleh factor kesengajaan dari seseorang untuk mengeruk keuntungan dari yang lain. Hal tersebut pada akhirnya mendorong

¹⁵ Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 104

1

erjadinya distorsi pasar. Upaya yang lazim dipakai dalam mengkondisikan harga seperti dengan jalan *ikhtikar* atau penimbunan.¹⁶

Dalam kondisi yang lain, harga juga bisa menurun manakala jumlah stok barang produksi melimpah sedangkan jumlah permintaannya menurun. Kelangkaan dan melimpahnya barang di pasar bagi Ibn Taimiyah tidak selamanya merupakan hasil dari rekayasa dari seseorang.

Dalam hal ini, untuk menjaga mekanisme pasar berjalan secara alamiah maka dua komponen penting yang harus di penuhi adalah berkaitan dengan ketersediaan produksi lokal dan produksi transnasional (impor). Sementara itu, beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekwensinya terhadap fluktuasi harga, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal, antara lain :

1. Keinginan masyarakat terhadap satu jenis barang yang berbeda dan sesekali mengalami perubahan.
2. Harga akan naik jika jumlah permintaan terhadap satu barang juga naik.
3. Harga juga ditentukan oleh tansaksi yang berlangsung. Satu waktu harga akan naik manakala transaksi terjadi antar produsen dengan konsumen yang sedang memiliki hutang pada produsen. Sebaliknya hara bisa jatuh lebih tinggi manakala transaksi terjadi antara produsen dan konsumen yang dianggap memiliki track recoard yang bagus. (kasus individual)

Ketiga komponen tersebut merupakan beberapa faktor yang sering kali mempengaruhi dinamika harga suatu komoditas dalam pasar. Di sisi lain, variabel yang amat penting dalam menjaga dinamika mekanisme pasar agar berjalan secara alamiah dan manakala terjadi struktur pasar yang distorsif maka ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah

Dalam konsepsi Islam, negara memiliki kewenangan yang bersifat mutlak adanya, sebab dengan kewenangan tersebut keberadaan masyarakat/rakyat akan terayomi. Kewenangan pokok tersebut adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Dua hal tersebut bersifat sangat vundamental, artinya manakala tidak terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemadloratan akan menimpa masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan dasar (*Basic Need*) dan kehidupan spiritual masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dilakukan sebuah negara.

¹⁶ Ibid., h.107-108

¹⁷ M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", edt. Ainur R. Shopian, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997),h. 29-30 19 Umar Chapra, Negara Sejahtera....., h. 35

dapun dalam bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan yang antara lain :

- a. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
- b. meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
- c. Menjaga hukum dan Ketertiban
- d. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi
- e. Mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan
- f. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.

Dengan tingkat kewenangan negara yang sedemikia rupa tersebut, maka distorsi pasar yang memiliki kecenderungan untuk mengeruk keuntungan (mengeksplotasi) dari pihak lain, akan dapat terminimalisasi. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan konsepsi peran negara prespektif kapitalisme. Oleh sebab itu, wajar manakala dalam mekanisme pasar kapitalisme memiliki kecenderung eksploitatif.

2. Regulasi Harga

Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Ia lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik."²⁰ Dari riwayat tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasul. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan. Bagi penulis, Hadist di atas dilatar belakangi oleh kondisi harga yang dalam prespektif Rasul masih bisa di jangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan baru dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya

iperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa Rasul seperti digambarkan di atas, para sarjana muslim merumuskan bahwa harga dalam kondisi tertentu bisa dilakukan stabilisasi.

Adapun institusi yang memiliki kewenangan adalah pemerintah atau negara. Beberapa pokok pemikiran sarjana muslim yang berkaitan dengan pengawasan harga antara lain :

- a. Tidak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang semestinya (mekanisme *Demand* dan *Suply*).
- b. Dalam kondisi apapun penetapan harga adalah bertentangan dengan keadilan dan kejujuran.
- c. Pengaturan harga selalu diperbolehkan
- d. Penetapan harga diperbolehkan apabila dalam kondisi yang darurat. Artinya daya beli masyarakat benar-benar tidak mampu menjangkau harga komoditas yang ada.

Di sisi lain, untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan suatu strategi yang holistik. Strategi ini meliputi reorganisasi seluruh sistem ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung,¹⁸ yaitu:

- a. Suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan *Khilafah* dan *al-Adl*.
- b. Suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir.
- c. Restrukturisasi seluruh sistem ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber prestise. Suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

¹⁸ M. Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Koterporer, Terjemah Nur Hadi Ihsan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), h.236

PEN UTUP

Pasar bebas yang sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat, dalam satu kondisi tidak selalu mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia seperti yang tergambar dalam paradigma sistem kapitalisme. Ketimpangan dan keburukan yang muncul dari mekanisme pasar bebas pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain berkenaan dengan kewenangan pemerintah dan regulasi dalam sistem perekonomian. Minimnya peran pemerintah dalam sistem kapitalisme *laissez faire* telah menggiring pada proses ketimpangan sosial yang membahayakan relasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah yang minim dalam pandangan Islam sangat tidak dibenarkan, sebab akan memicu distorsi mekanisme pasar.

Kecenderungan pasar untuk mengumpulkan keuntungan, haruslah di batasi dengan mekanisme filter yang bersumber pada ajaran agama. Dalam hal ini, Islam menawarkan mekanisme filter yang berbasis pada nilai moral yang tertuang dalam prinsip pokok sistem ekonomi Islam yakni *Tauhid*, *Khilafah* dan *al-Adl*. Dengan kewenangan pemerintah dan regulasi kebijakan ekonomi yang jelas, maka distorsi pasar yang pernah terjadi dalam sistem pasar bebas. perspektif kapitalisme akan seminimal mungkin dapat tereduksi yang pada akhirnya kesejahteraan akan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbagai kebijakan ekonomi dalam negeri, dekade terakhir ini yang semakin menunjukkan pada keberpihakannya pada sistem pasar bebas, melalui penguasaan asset-aset negara oleh asing, mulai dari perbankan sampai tambang, serta pencabutan subsidi kepada masyarakat secara bertahap adalah satu kebijakan yang harus dikembalikan pada fondasi perekonomian bangsa yakni dalam pasal 33 UUD 1945.

Daftar Pustaka

- A. Sony Keraf, *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Arief Ramelan Karseno, *Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar*, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, edt. Dr. Mohtar Mas' oed, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Edi Suharto, *Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47
- Faranz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kevin Danaher, *10 Reason Abolish IMF And World Bank*, terj. AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelaras, 2005
- M. Umar Chapra, *Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi* dalam "Etika Ekonomi Politik", edt. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

M.

Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemah Nur Hadi Ihsan, Surabaya: Risalah Gusti, 1998

Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenanda Media, 2005

Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro*, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996

Winardi, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Bandung: Transito, 1985

[Id.wikipedia.org/Laissezfaire/28-09-2020/19:30](https://id.wikipedia.org/Laissezfaire/28-09-2020/19:30)

www.id.wikipedia.org/pasarbebas//28-09-2020/21:30

[www.tkpri.org/peta rakyat miskin/29-09-2020/14:20](https://www.tkpri.org/peta_rakyat_miskin/29-09-2020/14:20)